



BUPATI LUWU UTARA PROVINSISULAWESISELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA AMORTISASI BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TAK
BERWUJUD PADA ENTITAS PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penetapan nilai Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, aset yang digunakan oleh pemerintah termasuk aset tak berwujud, mempunyai manfaat ekonomi atau potensi jasa terbatas yang perlu dilakukan amortisasi untuk penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dari suatu aset tak berwujud;
 - c. bahwa agar entitas Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dapat melakukan amortisasi barang milik daerah berupa aset tak berwujud secara efisien, efektif, dan optimal, diperlukan adanya suatu pedoman;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 355);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 354).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA AMORTISASI BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TAK BERWUJUD PADA ENTITAS PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA.

BABI

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
4. Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud, yang selanjutnya disebut Aset Tak Berwujud, adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi namun tidak memiliki wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, tetapi tidak terbatas pada hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, Perangkat Lunak (*software*) Komputer, Lisensi, Waralaba (*franchise*), Hak Cipta (*copyright*), paten, dan hak atas kekayaan intelektual lainnya.
5. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, yang selanjutnya disingkat SAP Berbasis Akrual, adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan financial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
6. Amortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud, yang selanjutnya disebut amortisasi adalah

alokasi harga perolehan Aset Tak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya, yang hanya dapat diterapkan atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas.

7. Masa manfaat adalah periode suatu aset diharapkan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik, yang dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Kabupaten Luwu Utara selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMD.
10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.
11. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
12. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional dan Catatan atas Laporan Keuangan.
13. Masa Manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan/atau pelayanan publik.
14. Laporan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat LBMD, adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang yang menyajikan posisi Barang Milik Daerah pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi Barang Milik Daerah yang terjadi selama periode tersebut.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur amortisasi terhadap Aset Tak Berwujud, termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam rangka pengelolaan BMD, yang berada pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang.
- (2) Pengaturan amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. objek amortisasi;
 - b. nilai aset tak berwujud yang dapat diamortisasi;
 - c. masa manfaat;
 - d. metode amortisasi;
 - e. penghitungan dan pencatatan; dan
 - f. penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Amortisasi Aset Tak Berwujud bertujuan untuk:

- a. menyajikan nilai Aset Tak Berwujud secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi Aset Tak Berwujud dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- b. mengetahui potensi Aset Tak Berwujud dengan memperkirakan sisa Masa Manfaat suatu Aset Tak Berwujud yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan; dan
- c. memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tak Berwujud yang sudah dimiliki.

BAB III

OBJEK AMORTISASI

Pasal 4

- (1) Amortisasi dilakukan terhadap Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas, antara lain meliputi:
 - a. perangkat lunak (*Software*) Komputer;
 - b. lisensi;
 - c. waralaba (*Franchise*);
 - d. hak cipta (*Copyright*); dan
 - e. hak paten.

- (2) Amortisasi tidak dilakukan terhadap:
 - a. Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan di bidang Hak Cipta (*copyright*) dan telah diusulkan kepada pengelola barang atau pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan di bidang pendelegasian kewenangan untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - b. Aset Tak Berwujud dalam kondisi usang dan/atau rusak berat yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendelegasian kewenangan, untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan.

Pasal 5

Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a:

- a. tidak lagi disajikan dalam Neraca; dan
- b. diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang Milik Daerah dan Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB IV

NILAI ASET TAK BERWUJUD YANG DAPAT DIAMORTISASI

Pasal 6

- (1) Nilai yang dapat dilakukan amortisasi pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2016 untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2016.
- (2) Nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan.
- (3) Untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh setelah tanggal 31 Desember 2016, nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai perolehan.
- (4) Dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui, digunakan nilai taksiran yang merupakan nilai estimasi.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tak Berwujud, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat dilakukan amortisasi.
- (2) Penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Kebijakan Akuntansi, Peraturan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pedoman Kapitalisasi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagai akibat penurunan nilai, maka pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat dilakukan amortisasi.
- (2) Penurunan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali, antara lain akibat adanya penurunan nilai pasar, manfaat ekonomi yang

diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan Aset Tak Berwujud tidak dapat dimanfaatkan, dan perubahan kebijakan penggunaan sistem.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagai akibat koreksi nilai Aset Tak Berwujud yang disebabkan oleh kesalahan pencatatan nilai yang diketahui di kemudian hari, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Amortisasi Aset Tak Berwujud tersebut, yang meliputi:
 - a. nilai Aset Tak Berwujud yang dapat dilakukan amortisasi;
 - b. nilai akumulasi amortisasi; dan
 - c. nilai beban amortisasi.
- (2) Dalam hal penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempengaruhi nilai amortisasi dalam Laporan Keuangan tahun anggaran yang lalu, maka penyesuaian dilakukan pula terhadap akun ekuitas.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai amortisasi Aset Tak Berwujud yang berpengaruh terhadap Laporan Keuangan semester sebelumnya pada tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian terhadap akun beban amortisasi dan akun akumulasi amortisasi.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nilai amortisasi Aset Tak Berwujud yang berpengaruh terhadap Laporan Keuangan periode sebelum tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian terhadap akun akumulasi amortisasi dan akun ekuitas.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan nilai amortisasi Aset Tak Berwujud yang berpengaruh terhadap Laporan Keuangan semester sebelumnya pada tahun anggaran berjalan dan sebelum tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian terhadap akun beban Amortisasi, akun akumulasi amortisasi, dan akun ekuitas.

Pasal 11

- (1) Penentuan nilai yang dapat diamortisasi dilakukan untuk setiap unit Aset Tak Berwujud tanpa adanya nilai residu.
- (2) Nilai residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai buku suatu Aset Tak Berwujud pada akhir Masa Manfaat.

BAB V

MASA MANFAAT

Pasal 12

- (1) Penentuan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud dilakukan dengan memperhatikan faktor prakiraan:
 - a. daya pakai;
 - b. tingkat keusangan; dan
 - c. ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas pemakaian aset, dari Aset Tak Berwujud tersebut.
- (2) Penetapan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud pada awal penerapan amortisasi dilakukan untuk setiap sub kelompok Aset Tak Berwujud, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi BMD.
- (3) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud tidak dapat dilakukan perubahan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perubahan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terjadi pengembangan Aset Tak Berwujud yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas manfaat; atau
 - b. terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud yang baru diketahui di kemudian hari.

Pasal 13

- (1) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan untuk setiap unit Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

- (2) Penentuan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tak Berwujud yang disajikan dalam Tabel Masa Manfaat Barang Milik Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud dapat diusulkan untuk diubah oleh Pengguna Barang dengan mempertimbangkan kesesuaian sisa Masa Manfaat Aset Tak Berwujud dengan kondisi Aset Tak Berwujud.
- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terjadi sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan menjadi penyebab sisa Masa Manfaat Aset Tak Berwujud tidak sesuai dengan kondisi Aset Tak Berwujud.

BAB VI

METODE AMORTISASI

Pasal 15

- (1) Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.
- (2) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat dilakukan amortisasi atas Aset Tak Berwujud secara merata setiap semester dengan pendekatan bulan penggunaan selama Masa Manfaat.
- (3) Perhitungan atas metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan nilai amortisasi per periode, dengan formula sebagai berikut:

NILAI YANG DIAMORTISASI

Amortisasi per periode : $\frac{\text{NILAI YANG DIAMORTISASI}}{\text{MASA MANFAAT}}$

BAB VII
PERHITUNGAN DAN PENCATATAN

Pasal 16

- (1) Perhitungan dan pencatatan Amortisasi Aset tak berwujud dilakukan pada tingkat Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Perhitungan dan Pencatatan Amortisasi Aset tak Berwujud dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Dalam hal di lingkungan Kuasa Pengguna Barang dibentuk unit pembantu penatausahaan, perhitungan dan pencatatan amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan oleh unit pembantu penatausahaan.
- (4) Hasil perhitungan dan pencatatan amortisasi Aset tak Berwujud yang dilakukan oleh unit pembantu penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun oleh Kuasa Pengguna Barang.
- (5) Hasil perhitungan dan pencatatan amortisasi Aset tak Berwujud yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil penghimpunan yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihimpun oleh Pengguna Barang.

Pasal 17

- (1) Penghitungan dan pencatatan amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan untuk setiap sub kelompok Aset Tak Berwujud.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghitungan dan pencatatan amortisasi Aset Tak Berwujud diperlakukan sebagai 1 (satu) unit Amortisasi Aset Tak Berwujud sepanjang aset tersebut hanya dapat dipergunakan bersamaan dengan Aset Tak Berwujud lainnya.
- (3) Penghitungan dan pencatatan terhadap Amortisasi Aset Tak Berwujud yang sebelumnya diperlakukan sebagai 1 (satu) unit Amortisasi Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal akan dicatat secara sendiri-sendiri, nilai buku beserta akumulasi Amortisasinya dialokasikan secara proporsional berdasarkan nilai masing-masing Aset Tak Berwujud, untuk dijadikan nilai yang dapat diAmortisasi selama sisa Masa Manfaat.

Pasal 18

- (1) Penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan setiap akhir semester dengan pendekatan bulan penggunaan tanpa memperhitungkan adanya nilai residu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil.
- (3) Penghitungan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan sejak diperolehnya Aset Tak Berwujud sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tak Berwujud.
- (4) Pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tak Berwujud sampai dengan Aset Tak Berwujud tersebut dihapuskan.

BAB VIII

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pasal 19

- (1) Amortisasi Aset Tak Berwujud setiap bulan disajikan sebagai:
 - a. beban Amortisasi dalam Laporan Operasional entitas akuntansi/entitas pelaporan; dan
 - b. akumulasi Amortisasi dalam Neraca entitas akuntansi/entitas pelaporan, berdasarkan SAP Berbasis Akrual.
- (2) Akumulasi Amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan faktor pengurang atas nilai Aset Tak Berwujud yang disajikan dalam Neraca.

Pasal 20

- (1) Penyesuaian atas perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat(1):
 - a. beban amortisasi disajikan dalam Laporan Operasional; dan
 - b. akumulasi amortisasi disajikan dalam Neraca.

- (2) Penyesuaian atas perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2):
 - a. akumulasi amortisasi disajikan dalam Neraca; dan
 - b. perubahan ekuitas disajikan dalam LPE.
- (3) Penyesuaian atas perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3):
 - a. beban amortisasi disajikan dalam Laporan Operasional;
 - b. akumulasi amortisasi disajikan dalam Neraca; dan
 - c. perubahan ekuitas disajikan dalam LPE.

Pasal 21

Informasi mengenai Amortisasi Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang Milik Negara dan Catatan atas Laporan Keuangan yang sekurang kurangnya memuat:

- a. nilai amortisasi periode berjalan;
- b. periode amortisasi;
- c. metode amortisasi yang digunakan;
- d. masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan;
- e. nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode; dan
- f. penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud.

Pasal 22

- (1) Aset Tak Berwujud yang seluruh nilainya telah dilakukan Amortisasi dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di Neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi amortisasinya.
- (2) Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam akun Aset Tak Berwujud dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang Milik Negara dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 23

- (1) Penyajian, penghitungan dan pengungkapan amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan berpedoman pada Modul Amortisasi Aset Tak Berwujud.
- (2) Modul Amortisasi Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan ada lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Aset Tak Berwujud yang seluruh nilainya telah diAmortisasi tidak serta merta dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan terhadap Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. aset tak berwujud yang diperoleh sebelum diberlakukannya amortisasi Aset Tak Berwujud, dikenakan koreksi amortisasi Aset Tak Berwujud; dan
- b. koreksi Amortisasi aset tak berwujud sebagaimana dimaksud pada huruf a :
 1. diperhitungkan sebagai penambah nilai akun akumulasi amortisasi dan pengurang nilai ekuitas pada Neraca;
 2. diperhitungkan sebagai transaksi koreksi pada periode diberlakukannya amortisasi;
 3. dikecualikan untuk Aset Tak Berwujud yang sudah dihapuskan pada akhir semester sebelum diberlakukannya amortisasi Aset Tak Berwujud.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP





Pasal 26

Amortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud berdasarkan SAP Berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai diterapkan dalam penyusunan Laporan Amortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017.

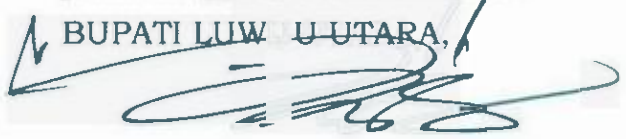
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEK DA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	


Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 5 Maret 2018

BUPATI LUWU UTARA,


PINDAH PUTRI INDRIYANI 

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 5 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,



ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN
2018 NOMOR 15

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 15 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA AMORTISASI BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TAK
 BERWUJUD PADA ENTITAS PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

TABEL MASA MANFAAT DALAM RANGKA PENIRINAN ALOKASI MANFAAT
 TERHADAP ASET TIDAK BERWUJUD BERUPA BARANG MILIK DAERAH
 PADA ENTITAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

KODEAKUN BARANG						URAIAN	MASA MANFAAT
1	5	3				ASET TAK BERWUJUD	
1	5	3	05	01		Software Urusan	
1	5	3	05	01	01	Pendidikan	5
1	5	3	05	01	02	Kesehatan	5
1	5	3	05	01	03	Pekerjaan Umum	5
1	5	3	05	01	04	Perumahan	5
1	5	3	05	01	05	Penataan Ruang	5
1	5	3	05	01	06	Perencanaan Pembangunan	5
1	5	3	05	01	07	Perhubungan	5
1	5	3	05	01	08	Lingkungan Hidup	5
1	5	3	05	01	09	Pertanahan	5
1	5	3	05	01	10	Kependudukan dan Capil	5
1	5	3	05	01	11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5
1	5	3	05	01	12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	5
1	5	3	05	01	13	Sosial	5
1	5	3	05	01	14	Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	5
1	5	3	05	01	15	Koperasi dan UKM	5
1	5	3	05	01	16	Penanaman Modal	5
1	5	3	05	01	17	Kebudayaan Pariwisata	5
1	5	3	05	01	18	Kependudukan dan Olah Raga	5
1	5	3	05	01	19	Kesatuan Bangsa dan Politik	5
1	5	3	05	01	20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	5
1	5	3	05	01	21	Pemberdayaan Masyarakat Desa	5
1	5	3	05	01	22	Statistik	5
1	5	3	05	01	23	Kearsipan	5
1	5	3	05	01	24	Perpustakaan	5
1	5	3	05	01	25	Komunikasi dan Informatika	5
1	5	3	05	01	26	Pertanian dan Ketahanan Pangan	5
1	5	3	05	01	27	Kehutanan	5
1	5	3	05	01	28	Energi dan Sumber Daya Mineral	5
1	5	3	05	01	29	Kelautan dan Perikanan	5
1	5	3	05	01	30	Lain-lain	5

1	5	3	05			HASIL KAJIAN	
1	5	3	05	02		Hasil Kajian Urusan	
1	5	3	05	02	01	Pendidikan	5
1	5	3	05	02	02	Kesehatan	5
1	5	3	05	02	03	Pekerjaan Umum	5
1	5	3	05	02	04	Perumahan	5
1	5	3	05	02	05	Penataan Ruang	5
1	5	3	05	02	06	Perencanaan Pembangunan	5
1	5	3	05	02	07	Perhubungan	5
1	5	3	05	02	08	Lingkungan Hidup	5
1	5	3	05	02	09	Pertanahan	5
1	5	3	05	02	10	Kependudukan dan Capil	5
1	5	3	05	02	11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5
1	5	3	05	02	12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	5
1	5	3	05	02	13	Sosial	5
1	5	3	05	02	14	Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	5
1	5	3	05	02	15	Koperasi dan UKM	5
1	5	3	05	02	16	Penanaman Modal	5
1	5	3	05	02	17	Kebudayaan Pariwisata	5
1	5	3	05	02	18	Kependudukan dan Olah Raga	5
1	5	3	05	02	19	Kesatuan Bangsa dan Politik	5
1	5	3	05	02	20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	5
1	5	3	05	02	21	Pemberdayaan Masyarakat Desa	5
1	5	3	05	02	22	Statistik	5
1	5	3	05	02	23	Kearsipan	5
1	5	3	05	02	24	Perpustakaan	5
1	5	3	05	02	25	Komunikasi dan Informatika	5
1	5	3	05	02	26	Pertanian dan Ketahanan Pangan	5
1	5	3	05	02	27	Kehutanan	5
1	5	3	05	02	28	Energi dan Sumber Daya Mineral	5
1	5	3	05	02	29	Kelautan dan Perikanan	5
1	5	3	05	02	30	Lain-lain	5
1	5	3	05			KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA	
1	5	3	05	03		Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Urusan	
1	5	3	05	03	01	Pendidikan	5
1	5	3	05	03	02	Kesehatan	5
1	5	3	05	03	03	Pekerjaan Umum	5
1	5	3	05	03	04	Perumahan	5
1	5	3	05	03	05	Penataan Ruang	5
1	5	3	05	03	06	Perencanaan Pembangunan	5
1	5	3	05	03	07	Perhubungan	5
1	5	3	05	03	08	Lingkungan Hidup	5
1	5	3	05	03	09	Pertanahan	5
1	5	3	05	03	10	Kependudukan dan Capil	5

1	5	3	05	03	11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5
1	5	3	05	03	12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	5
1	5	3	05	03	13	Sosial	5
1	5	3	05	03	14	Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	5
1	5	3	05	03	15	Koperasi dan UKM	5
1	5	3	05	03	16	Penanaman Modal	5
1	5	3	05	03	17	Kebudayaan Pariwisata	5
1	5	3	05	03	18	Kependudukan dan Olah Raga	5
1	5	3	05	03	19	Kesatuan Bangsa dan Politik	5
1	5	3	05	03	20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	5
1	5	3	05	03	21	Pemberdayaan Masyarakat Desa	5
1	5	3	05	03	22	Statistik	5
1	5	3	05	03	23	Kearsipan	5
1	5	3	05	03	24	Perpustakaan	5
1	5	3	05	03	25	Komunikasi dan Informatika	5
1	5	3	05	03	26	Pertanian dan Ketahanan Pangan	5
1	5	3	05	03	27	Kehutanan	5
1	5	3	05	03	29	Kelautan dan Perikanan	5
1	5	3	05	03	30	Lain-lain	5
1	5	3	05	04		Lisensi	10
1	5	3	05	05		Franchise	5
1	5	3	05	06		Hak Cipta	10
1	5	3	05	07		Hak Paten	50
1	5	3	05	08		Merek	10
1	5	3	05	09		Desain Industri	10
1	5	3	05	10		Rahasia Dagang	10

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA



INDAH PUTRI INDRIANI